

# LAPORAN KINERJA

## Bagian Keuangan

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**



TAHUN 2020

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2020 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2020 merupakan Laporan Kinerja tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021  
Plt. Koordinator Bagian Keuangan

**Endang Nurbiyanti**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2020 telah menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN yang diamanatkan kepada Bagian Keuangan.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Bagian Keuangan Tahun 2020 menurut Sasaran:

**Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya pengelolaan keuangan BSN secara transparan dan akuntabel	1. Jumlah draft laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester, unaudited dan audited	19 laporan	19 laporan	100%
	2. Jumlah draft laporan laporan pengelolaan PNPB	4 laporan	4 laporan	100%
	3. Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan	4 laporan	4 laporan	100%
2. Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan yang diberikan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	4. Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Bagian Keuangan	3,7 nilai	3.21 nilai	86,8%
<b>Rata-rata capaian Tahun 2020</b>				<b>96,7%</b>

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Dari 4 (empat) indikator kinerja di Bagian Keuangan, terdapat 3 indikator kinerja yang realisasinya mencapai 100% dari target, yaitu: (1) Jumlah draft laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester, unaudited dan audited; (2) Jumlah draft laporan laporan pengelolaan PNPB; dan (3) Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan. Sedangkan

untuk indikator kinerja Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Bagian Keuangan mencapai realisasi sebesar 86,8% dari target.

Tidak tercapainya target Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Bagian Keuangan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga layanan pencairan uang dan proses pertanggungjawaban menjadi terkendala. Namun hal ini dapat diperbaiki pada semester ke-2 tahun 2020 dengan mengatur jadwal piket dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi pendukung seperti *Mandiri Cash Management* untuk pencairan uang.

# DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	1
<b>Kata Pengantar</b> .....	2
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	3
<b>Daftar Isi</b> .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	6
I.2 Maksud dan Tujuan .....	6
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
I.4 Sumber Daya Manusia .....	8
I.5 Peran Strategis .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
II.1 Perencanaan Strategis .....	10
II.1.1 Visi dan Misi .....	10
II.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	12
II.2 Perjanjian Kinerja .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
III.1 Capaian Kinerja .....	17
III.2 Realisasi Anggaran .....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Penutup .....	23
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

## I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bagian Keuangan, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Bagian Keuangan memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Biro PKU dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bagian Keuangan merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro PKU Tahun 2020.

## I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bagian Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

### I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

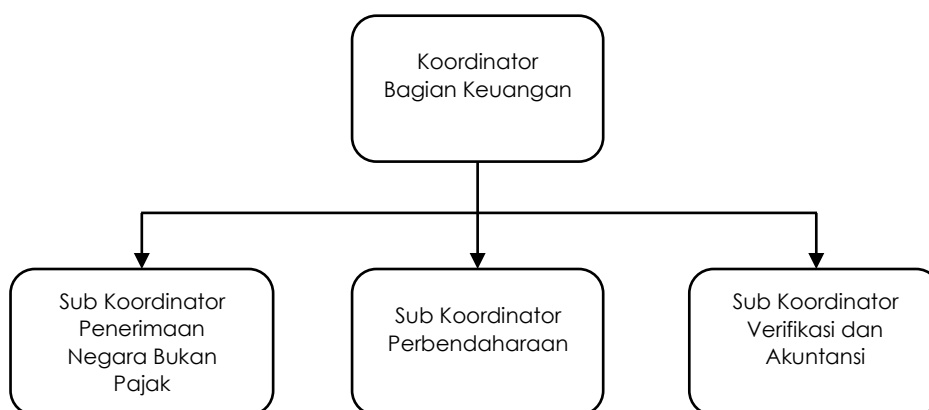
Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Bagian Keuangan untuk membantu tugas Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum yaitu melaksanakan perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan perbendaharaan, pemantauan serta evaluasi administrasi dan pengelolaan keuangan.
2. Pelaksanaan verifikasi dokumen keuangan dan menyiapkan bahan akuntansi pelaporan keuangan.
3. Pelaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran serta penyusunan laporan penerimaan negara bukan pajak.

Struktur Bagian Keuangan dapat dilihat pada gambar berikut.

#### Bagan Struktur Organisasi



**Gambar I.1**  
**Struktur Organisasi Bagian Keuangan**

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bagian Keuangan mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. **Subbagian Perbendaharaan**, dengan tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan, pemantauan serta evaluasi administrasi dan pengelolaan keuangan.
2. **Subbagian Verifikasi dan Akuntansi**, dengan tugas melakukan verifikasi dokumen keuangan dan menyiapkan bahan akuntansi pelaporan keuangan.
3. **Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak**, dengan tugas melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran serta penyusunan laporan penerimaan negara bukan pajak.

#### I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2020 Bagian Keuangan memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 18 (delapan belas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Personel ASN Bagian Keuangan**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	Subbagian Perbendaharaan	6	4	0	10
2.	Subbagian Verifikasi dan Akuntansi	1	3	0	4
3.	Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak	2	2	0	4
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>18</b>

#### I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bagian Keuangan mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Bagian Keuangan telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.



**Tabel I.2**  
**Potensi dan Permasalahan Bagian Keuangan**

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan Aplikasi SIPAKAR dan Aplikasi SAS yang kurang maksimal</li> <li>2. Pandemi Covid-19 yang mengganggu proses bekerja</li> <li>3. Pengurangan interaksi dalam memberikan layanan keuangan kepada internal BSN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hilangnya database Aplikasi Sipakar sehingga mengganggu jalannya proses pertanggungjawaban kegiatan</li> <li>2. Proses pertanggungjawaban tidak dapat berjalan dengan normal karena keterbatasan waktu dan lokasi dalam mengakses dokumen fisik</li> <li>3. Pencairan dan penyerahan dana tidak dapat dilakukan setiap saat karena adanya isolasi di gedung kantor dan bank terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>restore</i> database secara manual untuk mengembalikan data yang telah hilang</li> <li>2. Melakukan backup database Aplikasi Sipakar secara rutin</li> <li>3. Menyimpan dokumen pertanggungjawaban di <i>cloud</i> sehingga pemeriksaan dokumen dan proses pertanggungjawaban lainnya dapat terus berjalan dan tidak menghambat kegiatan</li> <li>4. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi <i>Mandiri Cash Management</i> dalam hal pembayaran dana kepada penerima.</li> </ol>

### II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

#### II.1.1 Visi dan Misi

**B**adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### VISI

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

## MISI

### **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

Dalam hal ini, Bagian Keuangan berkontribusi secara langsung terhadap tahapan, yaitu Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi

## II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	1. Nilai reformasi birokrasi BSN, dengan target sd 2024 sebesar 87 (nilai).

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN adalah sebagai berikut:

## SASARAN

Sasaran Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024:

1. Terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja BSN.
2. Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan.
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan BSN secara transparan dan akuntabel.
4. Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan umum yang diberikan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan.
5. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran.

### II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan Tahun 2020 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

**Tabel II.1**  
**Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1. Terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja BSN	1. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja pada kriteria pengungkit	4 Nilai
3. Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	2. Nilai AKIP BSN di luar nilai komponen evaluasi internal (90% dari 14%)	8,85 Nilai
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan BSN secara transparan dan akuntabel	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP Opini BPK
3. Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan umum yang diberikan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	4. Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	3.7 Indeks
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran	5. Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	≥ 97 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan pada tahun 2020 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Bagian Keuangan Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.2**  
**Perjanjian Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan BSN secara transparan dan akuntabel	Jumlah draft laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester, unaudited dan audited	19 laporan
		Jumlah draft laporan laporan pengelolaan PNBK	4 laporan
		Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan	4 laporan
2	Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan yang diberikan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Bagian Keuangan	3,7 nilai

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN melalui :

1. Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum, yang akan menghasilkan output :
  - Output : Layanan Sarana dan Prasarana Internal  
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :
    1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
    2. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
  - Output: Layanan Perencanaan  
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :
    1. Penyusunan Rencana Kerja
    2. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
    3. Penyusunan Pemantauan dan Evaluasi
    4. Penyusunan Laporan Tahunan
    5. Penyusunan RKA-K/L

6. Penyusunan Laporan Kinerja
  - Output: Layanan Manajemen Keuangan  
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :
    1. Penyusunan Laporan Keuangan
    2. Pengelolaan Perbendaharaan
    3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  - Output: Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)  
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :
    1. Penatausahaan BMN
    2. Pengalihan BMN
    3. Penghapusan BMN
    4. Penyusunan Laporan BMN
  - Output: Layanan Umum  
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :
    1. Layanan Umum Rumah Tangga
    2. Pengelolaan Arsip dan Persuratan
    3. Pengadaan Barang/Jasa
    4. Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan
  - Output: Layanan Perkantoran  
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :
    1. Gaji dan Tunjangan
    2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor





akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kerjanya, Bagian Keuangan telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Bagian Keuangan Tahun 2020.

### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bagian Keuangan yang direncanakan dalam Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

## Pencapaian Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengelolaan keuangan BSN secara transparan dan akuntabel	Jumlah draft laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester, unaudited dan audited	19 laporan	19 laporan	100%
	Jumlah draft laporan laporan pengelolaan PNBK	4 laporan	4 laporan	100%
	Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan	4 laporan	4 laporan	100%
Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan yang diberikan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Bagian Keuangan	3,7 nilai	3.21 nilai	86,8%
<b>Rata-rata capaian Tahun 2020</b>				<b>96,7%</b>

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bagian Keuangan untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**SASARAN  
1****Meningkatnya Pengelolaan Keuangan BSN Secara  
Transparan Dan Akuntabel****Tabel III.2  
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d. 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
1. Jumlah draft laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester, unaudited dan audited	laporan	100%	19	19	100%	95	40%
2. Jumlah draft laporan laporan pengelolaan PNBP	laporan	100%	4	4	100%	20	40%
3. Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan	laporan	100%	4	4	100%	20	40%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan pengelolaan keuangan BSN secara transparan dan akuntabel terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

**1. Jumlah draft laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester, unaudited dan audited**

Target dari indikator kinerja ini berjumlah 19 (sembilan belas) draft laporan yang terdiri dari 12 (dua belas) laporan keuangan bulanan, 4 (empat) laporan keuangan triwulanan, 1 (satu) laporan keuangan semester, 1 (satu) laporan keuangan unaudited tahun 2019, dan 1 (satu) laporan keuangan audited tahun 2019.

Bagian keuangan telah berhasil menyusun 19 (sembilan belas) draft laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester, unaudited dan audited, sehingga pencapaian indikator kinerja ini telah terpenuhi 100%.

Laporan keuangan unaudited tahun 2019 disusun pada bulan Januari – Februari 2020 untuk disampaikan kepada pemeriksa pada saat pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan laporan keuangan audited tahun 2019 disusun pada bulan April – Mei 2020 setelah audit oleh BPK telah selesai dilaksanakan.

Kendala yang terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan ini yaitu perlunya koordinasi dengan pengelola Barang Milik Negara (BMN) agar dapat menyampaikan data yang tepat dan sesuai dalam laporan keuangan.

## **2. Jumlah draft laporan pengelolaan PNB**

Draft laporan pengelolaan PNB terdiri dari laporan triwulanan sebanyak 4 laporan. Laporan ini berisi data penerimaan dan penggunaan dana PNB.

Bagian Keuangan telah berhasil menyusun draft laporan pengelolaan PNB sebanyak 4 laporan, sehingga pencapaian indikator kinerja ini terpenuhi 100%.

## **3. Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan**

Draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan merupakan laporan yang berisi hasil koordinasi, monitoring, dan realisasi anggaran yang disusun setiap triwulanan.

Bagian keuangan telah menyusun draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan sebanyak 4 laporan, sehingga pencapaian indikator ini terpenuhi 100%.

Efisiensi telah dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIPAKAR dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta penggunaan cloud untuk menyimpan dokumen pertanggungjawaban agar dapat diproses secara online. Pembayaran dan penyerahan dana pun lebih banyak dilakukan dengan cara transfer melalui aplikasi *Mandiri Cash Management* oleh bendahara kepada penerima dana. Hal ini dilakukan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

**SASARAN  
2****Meningkatnya Kepuasan Internal Unit Kerja BSN Atas Layanan yang Diberikan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan****Tabel III.3  
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d. 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
1. Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Bagian Keuangan	Nilai	3.1	3,7	3,21	86,8%	....	... %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan Kepuasan Internal Unit Kerja BSN Atas Layanan yang Diberikan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 86,8% Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

**1. Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Bagian Keuangan**

Indeks kepuasan internal BSN diperoleh dari pelaksanaan Survey Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan. Total responden dari survey ini berjumlah 46 orang terdiri dari berbagai unit kerja. Metode analisa yang dilakukan yaitu metode kuantitatif sehingga mendapatkan rata-rata skor pada setiap pertanyaan. Nilai skor inilah yang merupakan indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Bagian Keuangan

Layanan Bagian Keuangan terdiri dari: (1) Pengajuan usulan kebutuhan dana, (2) Pengajuan uang persediaan, (3) Pengajuan LS, (4) Pengambilan Uang Persediaan dan LS Bendaharaa, (5) Penyampaian dokumen pertanggungjawaban, dan (6) Pengajuan target dan revisi PNBK.

Bagian Keuangan memperoleh indeks kepuasan tertinggi di Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan yaitu sebesar 3,21. Namun pencapaian ini masih di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 3.7. Sehingga pencapaian indikator kinerja ini sebesar 86,8%.

Beberapa masukan dari unit kerja telah disampaikan pada saat pelaksanaan survey yaitu sebagai berikut: (1) Manajemen perputaran uang perlu ditingkatkan, (2) Aplikasi yang digunakan dapat ditingkatkan lagi penggunaannya dan dapat dilakukan sinkronisasi dengan aplikasi

Kementerian Keuangan, dan (3) Proses pertanggungjawaban diharapkan bisa lebih cepat.

Bagian keuangan berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan cara melaksanakan masukan dari unit kerja. Peningkatan aplikasi SIPAKAR telah dilakukan baik dari sisi sistem aplikasi maupun keamanan database, sehingga aplikasi SIPAKAR dapat lebih diandalkan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta mempercepat proses pertanggungjawaban.

### III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2020 tanggal 12 November 2019, pagu anggaran TA 2020 Bagian Keuangan adalah sebesar Rp 1.052.000.000,- (satu miliar lima puluh dua juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.047.563.196 (satu miliar empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) atau 99,58%.

Pagu dan realisasi anggaran Bagian Keuangan TA. 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.4**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Bagian Keuangan TA. 2020**

*Dalam rupiah*

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2020		%
		Pagu	Realisasi	
051	Penyusunan Laporan Keuangan	163.206.000	161.335.145	98,85%
052	Pengelolaan Perbendaharaan	766.976.000	765.246.000	99,77%
053	Pengelolaan PNBPN	121.818.000	120.982.051	99,31%
	<b>Jumlah</b>	<b>1.052.000.000</b>	<b>1.047.563.196</b>	<b>99,58%</b>

Laporan Kinerja kinerja Bagian Keuangan Tahun 2020 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja kinerja Bagian Keuangan Tahun 2020 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan kinerja Bagian Keuangan Tahun 2020, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu (1) Jumlah draft laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester, unaudited dan audited; (2) Jumlah draft laporan laporan pengelolaan PNBK; (3) Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan, dan (4) Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Bagian Keuangan.

Dari 4 (empat) indikator kinerja di Bagian Keuangan, terdapat 3 indikator kinerja yang realisasinya mencapai 100% dari target, yaitu: (1) Jumlah draft laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester, unaudited dan audited; (2) Jumlah draft laporan laporan pengelolaan PNBK; dan (3) Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan. Sedangkan untuk indikator kinerja Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Bagian Keuangan mencapai realisasi sebesar 86,8% dari target.

Bagian keuangan akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap unit kerja agar dapat menghasilkan indeks kepuasan internal BSN yang lebih baik, serta mempertahankan realisasi kinerja yang telah mencapai target.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
Bagian Keuangan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BAGIAN KEUANGAN  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatnya pengelolaan keuangan BSN secara transparan dan akuntabel	1 Jumlah draft Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semester, Unaudited, Audited	19 Laporan
	2 Jumlah draft Laporan Pengelolaan PNBPNP	4 Laporan
	3 Jumlah draft laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan	4 Laporan
2 Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan yang diberikan Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum	4 Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Bagian Keuangan	3.7 Nilai

Pihak Kedua

M. Beni Nugraha

Jakarta, 2 Januari 2020  
Pihak Pertama

Ajat Sudrajat